

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PELAKU USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI SERTIFIKASI HALAL**

TESIS

Oleh:

**MAHDISIN
2302198042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PELAKU USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI SERTIFIKASI HALAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Mahdisin
2302198042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Mahdisin
NIM : 2302198042
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Sertifikasi Halal” Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Juli 2025



Mahdisin



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Sertifikasi Halal

Oleh :

Nama : Mahdisin
NIM : 2302198042
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Juli 2025
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
NIDN: 0330106505

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi, S.T, S.H., M.H, C.L.A.
NIDN: 0322117104

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Paltijada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



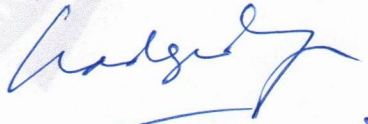
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 25 Juni 2025 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mahdisin
NIM : 2302198042
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Sertifikasi Halal”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H..	Sebagai Ketua	
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T, S.H., M.H., C.L.A.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H..	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdisin
NIM : 2302198042
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Sertifikasi Halal**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, Juli 2025



Mahdisin

KATA PENGANTAR

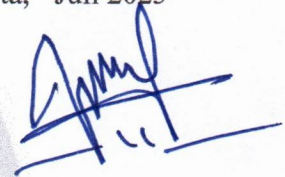
Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd., PA. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T, S.H., M.H., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini
6. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan nya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, Juli 2025



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN . PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep.....	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Landasan Teori.....	22
1. Teori Kepastian Hukum.....	22
2. Teori Positivisme.....	26
B. Tinjauan umum tentang efektivitas.....	29
C. Tinjauan umum tentang Produk Halal	33

D. Tinjauan umum tentang sertifikat Halal	40
E. Tinjauan umum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	43
 BAB III PENGATURAN TERKAIT SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA.....	48
A. Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Di Indonesia	48
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait jaminan produk halal bagi Pelaku UMK	63
 BAB IV AKIBAT HUKUM SERTA KENDALA-KENDALA JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU UMK DI INDONESIA.....	93
A. Kendala Sertifikasi Halal	93
B. Peranan pemerintah pada Sertifikasi Halal	103
 BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA.....	118

ABSTRAK

UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, menetapkan peraturan baru yang berkaitan dengan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk pelaku UMKM, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMKM (*self declare*) yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM tidak dikenai biaya. Kemudahan bagi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM untuk lebih berdaya saing..

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Sebagai kesimpulan, Pertama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memperkuat kerangka hukum sertifikasi halal di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM. Regulasi ini bertujuan melindungi hak konsumen Muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal melalui penyederhanaan proses sertifikasi, seperti pembebasan biaya bagi UMKM dan percepatan prosedur administrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap alur sertifikasi, koordinasi antarlembaga (BPJPH, MUI, dan LPH), serta kekosongan hukum terkait sanksi bagi produk yang belum bersertifikat. Kedua, Sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi, rendahnya kesadaran akan kewajiban sertifikasi, serta keyakinan bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi resmi. Selain itu, kompleksitas birokrasi, biaya, dan kurangnya sumber daya pendampingan turut menghambat proses sertifikasi.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

The Job Creation Law amends, removes, and establishes new regulations related to the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). The Job Creation Law states that for MSME actors, the obligation to be halal certified is based on their statement (self-declare), which is carried out based on the halal standards set by BPJPH. In addition, the submission of halal certification by MSMEs is free of charge. The convenience for MSME actors in halal certification is a form of government support for MSMEs to be more competitive.

The type of research used when compiling the thesis is normative legal research (normative legal research method). Normative legal research is a process to find a regulation, principle, or legal doctrine to solve a problem. This research uses the statutory approach method (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).

In conclusion, first, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has strengthened the legal framework for halal certification in Indonesia, especially for MSMEs. This regulation aims to protect the rights of Muslim consumers while increasing the competitiveness of local products by simplifying the certification process, such as exemption of fees for MSMEs and acceleration of administrative procedures. However, its implementation still faces challenges, such as the lack of understanding of MSMEs regarding the certification process, coordination between institutions (BPJPH, MUI, and LPH), and legal vacuum regarding sanctions for products that have not been certified. Second, halal certification for MSMEs in Indonesia still faces various obstacles, such as the lack of understanding of business actors about the importance of certification, low awareness of certification obligations, and the belief that their products are already halal without the need for official certification. In addition, bureaucratic complexity, costs, and lack of assistance resources also hamper the certification process.

Keywords: Halal Certification, Micro, Small and Medium Enterprises, Legal Effectiveness